



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 876/VIII/2015

III/AGUSTUS 2015



SIDANG APA SETUJUI DUA DRAF USULAN DPR



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

SIDANG APA SETUJUI DUA DRAF USULAN DPR



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf bersama Delegasi APA di Jakarta

Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development telah menyetujui dua draf resolusi usulan DPR yaitu, *Financial Affairs Ensuring Effort for Economic Growth* dan *The Role of APA Parliaments in adopting SDGs*.

Usulan draf resolusi DPR yang bertajuk *The Role of APA Parliaments in adopting SDGs* bahkan disetujui secara bulat oleh seluruh anggota APA. Draf tersebut mendorong negara anggota APA untuk mengevaluasi struktur dan mekanisme internal masing-masing parlemen agar pengarusutamaan SDGs dapat terakomodasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota BKSAP Arief Suditomo, Kamis, (20/8) di Jakarta.

Fadli mengatakan, draf tersebut juga menekankan agar parlemen terlibat aktif dalam beragam aktivitas terkait SDGs, termasuk dalam hal membangun rasa kepemilikan nasional dalam

isu SDGs.

Sidang APA Standing committee tersebut digelar dengan tema *Linking Economic Growth to Sustainable Development for Peace and Prosperity* merangkul beragam pembahasan yang menjadi *concern* parlemen negara-negara di Asia, dua diantaranya usulan DPR. Selain itu, tiga draf usulan lainnya yaitu *Integrated Energy Market in Asia*, *Global Warming dan Poverty Eradication*.

Fadli menambahkan, DPR mencetuskan ide membentuk dana stabilisasi regional untuk kawasan Asia. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengaman seandainya negara-negara di Asia mengalami krisis finansial berkelanjutan. "Langkah tersebut juga sebagai upaya mengurangi pengaruh dana moneter internasional (IMF) yang terkadang sering mencantumkan syarat-syarat yang memberatkan dalam pemberian dana talangan," katanya.

Ide ini, tambah Fadli, bersamaan dengan usulan DPR lainnya agar Parlemen di Asia dapat menyusun sebuah

protokol krisis yang disepakati dalam satu paket resolusi terkait isu *financial affairs* yang dibahas oleh Parlemen negara-negara se-Asia dalam sidang ini.

Dalam isu pasar energi, APA menghasilkan kesepakatan agar Grup Penasihat APA (*Advisory Group on Energy*) dapat memperluas aktifitasnya demi pengembangan energi berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pencapaian SDGs.

Draf Poverty Eradication memperjelas beberapa strategi legislasi dalam pengentasan kemiskinan yang keseluruhannya berfokus pada peningkatan IPM, termasuk pada legislasi yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Sidang APA tang dihadiri 21 negara di kawasan Asia ini cukup istimewa karena menghadirkan dua pakar terkait dengan isu-isu pembahasan yakni, Soedrajat Djiwandono pakar dari *Rajaratnam School of International Studies*, Singapura dan Rizal Ramli yang kini menjabat sebagai Menko Kemaritiman.

Paparan kedua pakar tersebut memperkaya draf resolusi terutama dalam beberapa isu seperti finansial, perubahan iklim, hingga pemberantasan kemiskinan terutama terkait dorongan agar Asia tidak berfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Fadli juga menyampaikan, dalam sidang ini DPR juga mengundang negara-negara anggota APA untuk menghadiri *the 6th Conference of GOPAC (Global Organization Parliamentarians Against Corruption)* yang akan diadakan di Yogyakarta pada tanggal 6-8 Oktober mendatang. (tt) foto: iwan armanias/parle/hr



Pameran Seni Rupa, Bentuk Apresiasi DPR Terhadap Seni



Ketua DPR Setya Novanto menggunting pita dibukanya pameran lukisan di DPR

Dalam rangkaian acara memperingati HUT RI dan HUT DPR-RI ke 70, DPR mengadakan pameran seni rupa karya 17 Seniman Indonesia dengan kurator Dio Pamola dan Wahyudin. Pameran Seni Rupa tersebut mengambil tema “Kepada Republik”.

Pameran dibuka Kamis (20/08/2015)

berlangsung hingga Rabu (26/08/2015) di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen Senayan dan dibuka untuk umum. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Selain dihadiri oleh 17 pelukis, hadir pula para pelaku seni

dan hadir 15 Duta Besar negara-negara sahabat.

“Pameran seni rupa yang diselenggarakan DPR merupakan salah satu bentuk apresiasi yang nyata untuk mengakomodir aspirasi dan merangsang potensi seni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,” ungkap Setya Novanto.

Menurut Novanto, karya seni merupakan salah satu bagian dari budaya luhur bangsa Indonesia. “Karya anak bangsa semestinya adalah aset negara yang sangat berharga,” terang Novanto.

Ia mencontohkan bahwa karya seni man Pablo Picasso asal Spanyol bisa mencapai harga penjualan Rp2,5 triliun yang digadag-gadag sebagai karya seni termahal di dunia saat ini. Bukan tidak mungkin hasil cipta karya seni seniman-seniman asal Indonesia bisa menjadi karya yang diburu dan membanggakan seperti Pablo Picasso.

Melalui pameran seni rupa ini Novanto mengajak semua komponen bangsa untuk melanjutkan dan memperkenalkan potensi seni secara serius dan memasyarakatkannya serta melindunginya. (skr) foto: denus/parle/hr

PEMERINTAH DIMINTA TINGKATKAN PERANNYA TANGANI KASUS KEMANUSIAAN

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Pemerintah Indonesia untuk lebih berperan dalam persoalan kemanusiaan yang terjadi di kancah dunia seperti para pengungsi Rohingya. Karena itu, papar Fahri, kita harus merombak *mindset* kita agar dapat mengambil peran global tersebut.

“Kita harus menyusun advokasi dan regulasinya agar dapat memberikan bantuan terhadap persoalan kemanusiaan yang ada di dunia,” papar Fahri usai Seminar Komite Nasional Untuk Solidaritas Rohingya (KNSR), di Gedung Pansus B, Kamis, (20/8).

Menurutnya, negara terkesan mengisolir diri dari pergaulan dunia, bahkan seolah-olah pergaulan internasional tidak penting hingga nama Indonesia tidak dianggap dalam percaturan dunia.

“Negara mengisolir diri dari pergaulan internasional tidak saja ekonomi tetapi politik saja tidak dianggap dengan negara kawasan, misal saja Qatar dengan penduduk sekitar 270 ribu orang, namun negara itu sebagai pemain politik



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai membuka seminar KNSR

di Timur Tengah, begitu juga Iran yang selalu dibicarakan dalam politik internasional,” paparnya.

Dia menambahkan, kita sebagai warga negara harus belajar dari berbagai persoalan kemanusiaan seperti Rohingya. “Kita harus belajar dari persoalan Rohingya bahwa faktanya kita memiliki kekuatan rakyat yang luar biasa dalam menangani persoalan kemanusiaan ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, kekuatan rakyat terlihat bahu membahu dalam menangani dan memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya sangat luar biasa. “Negara kita saat ini terkesan mengisolir diri padahal ini mandat UUD 1945, hal itu merupakan watak dari kepemimpinan sejak Soekarno bahwa kita turut serta dalam perdamaian dunia,” paparnya.

(Si) foto: jaka/parle/hr

KEDAULATAN BELUM SEPENUHNYA DIREBUT



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Kedaulatan bangsa Indonesia belum sepenuhnya direbut. Kedaulatan yang dimaksud adalah kedaulatan pangan, energi, ideologi, dan teritori. Bangsa Indonesia baru mampu merebut kedaulatan dari kolonialisme.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menyampaikan pidato sebagai inspektur upacara HUT Proklamasi di halaman gedung DPR, Senin (17/8). Rakyat akan bahagia bila kebutuhan pangan dan sandangnya dicukupi. Inilah titik penting dalam merebut kedaulatan bangsa.

“Kedaulatan yang baru kita rebut adalah kedaulatan yang kita rebut dari kolonialisme. Tapi kedaulatan lainnya masih jauh, seperti kedaulatan pangan, energi, teritori, dan ideologi,” katanya. Lebih lanjut Fadli menyatakan, kemerdekaan yang sesungguhnya ingin direbut adalah kemerdekaan dari kebodohan dan kemiskinan. Kesulitan-kesulitan hidup yang dahulu dialami rakyat Indonesia, jadi fokus perhatian para pendiri bangsa.

Hadir dalam upacara tersebut beberapa anggota DPR, para pejabat, pegawai, tenaga ahli, dan staf anggota di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Upacara dimulai pukul 09:00. Peserta upacara mengenakan batik beraneka corak dan ragamnya. Inilah upacara perdana yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR. Dalam menyambut HUT Proklamasi ke 70 tahun kali ini, dimeriahkan pula oleh lomba panjat bambu dan mewarnai gambar, sehari sebelumnya. Gedung DPR begitu meriah dan semarak. (mh), foto: andi/parle/hr.

DPR BAHAS HUBUNGAN BILATERAL DENGAN DELEGASI KONGRES AS

Pimpinan DPR RI menerima kunjungan Delegasi Kongres Amerika Serikat, di Gedung Nusantara III, Minggu (16/08/15). Hubungan bilateral kedua negara menjadi pembahasan utama dalam pertemuan yang digelar bersamaan dengan Pesta Rakyat yang diselenggarakan DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-70.

“Pertemuan tadi membahas hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat, dan *people to people contact*. Indonesia berharap Amerika Serikat mengadakan investasi dan kerjasama dalam bidang pendidikan, ekonomi, investasi, dan industri,”



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Kongres AS

kata Ketua DPR Setya Novanto usai pertemuan dengan Delegasi Kongres AS yang dipimpin oleh Senator Vern Buchanan (Florida).

Dalam pertemuan ini, Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadi Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Hadir juga Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha, dan Anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi.

Novanto menambahkan, pihaknya juga ingin mengetahui pengalaman Kongres Amerika Serikat dalam menangani mekanisme tenaga ahli, peneliti, kinerja komisi, baik dari fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran, serta fungsi representasi diplomasi.

“Sebagai negara demokrasi yang tergolong masih muda, kami ingin belajar dari pengalaman Kongres AS,” imbuh Politisi F-PG itu.

Novanto menambahkan, pihaknya akan mengunjungi Kongres Amerika di Washington DC pada September

mendatang.

“Kami bermaksud untuk berkunjung ke Washington DC, dan bertemu dengan *speaker house*, Kaukus Indonesia di Kongres Amerika, dan berbagai pihak lain dalam hubungan parlemen,” kata Politisi asal Dapil NTT itu.

Ditemui usai pertemuan, Senator Vern Buchanan menyatakan hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika sudah sangat baik. Ia juga berharap, hubungan bilateral ini, AS dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Untuk tata kelola pemerintahan, pihaknya juga ingin bertukar pikiran, gagasan, dengan masyarakat Indonesia untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika.

“Hubungan Indonesia dan Amerika sangat baik. Kami berharap hubungan Indonesia dan Amerika semakin baik ke depannya,” kata Vern.

Kedatangan Delegasi Kongres AS ini bertepatan dengan jelang HUT Kemerdekaan RI, sehingga Vern me-

nyampaikan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami tidak sabar untuk mengikuti perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia,” imbuh Vern.

Sebelumnya, Delegasi Kongres AS juga sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Ia juga sudah tidak sabar menunggu kedatangan Delegasi Indonesia pada September dan kunjungan Presiden Indonesia pada Oktober mendatang.

Delegasi Kongres AS diikuti oleh David Price (North Carolina), Susan Davis (California), Adrian Smith (Nebraska), Jim McDermott (Washington), Dina Titus (Nevada). Dalam acara ini, delegasi juga didampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia (Robert Blake).

Acara diakhiri dengan pertukaran cinderamata. Selain bertemu dengan DPR, Delegasi Kongres AS juga bertemu dengan MPR dan Komisi I DPR pada hari yang sama. (sf), foto : iwan armanias/parle/hr.

Kongres Nasional Kamboja Belajar BPJS di DPR

DPR RI menerima delegasi Kongres Nasional Kamboja untuk mempelajari undang-undang tentang BPJS. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan amanat dari kesejahteraan masyarakat itu diantara satu implementasinya adalah undang-undang BPJS.

“Sekarang delegasi bertemu dengan Komisi IX (bidang kesehatan dan ketenagakerjaan), disana mereka berdiskusi secara detail tentang Sistem Jaminan Sosial yang ada Indonesia,” kata Fahri, Rabu (19/8), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Wakil Ketua DPR Korkesra ini, DPR menerimanya dengan perasaan bersaudara, sebab bangsa Indonesia dengan bangsa Kamboja mempunyai banyak kesamaan dan latar belakang. Bahkan sebagiannya menganggap bahwa kerajaan-kerajaan Hindu, Budha di Jawa dulu, itu berasal dari kerajaan yang sama dengan Kamboja. Khususnya jika kita lihat seperti artefak-artefak yang ada di Borobudur itu banyak kesamaan dengan yang ada di Kamboja.



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima Kongres Nasional Kamboja

la memastikan adanya kerjasama diantara parlemen Negara Asean sangat berarti. “Penting buat kita menerima tamu, memberikan perasaan nyaman, kemudian dilayani. Kedua negara ha-

rus saling membantu supaya negara-negara Asean bisa kuat, bisa berdiri tegak,” katanya. (as) foto: jaka/parle/hr

FAHRI: KPK DESTRUksi NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah semakin dalam mendestruksi (merusak) nilai-nilai kebangsaan. Banyak kerja KPK ternyata hanya untuk pencitraan. Akhirnya, yang terjadi saat ini adalah saling intip, curiga, dan dendam antarsesama anak bangsa.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Selasa sore (18/8) di DPR. “KPK datang seperti menggugat banyak hal baik di dalam tubuh kita. Misalnya, saling memperhatikan dan berbagi hadiah. Itu enggak ada hubungannya dengan korupsi. Ada destruksi terhadap nilai-nilai kebangsaan kita, seolah-olah berbagi hadiah itu bagian dari korupsi. Itu salah.”

Menurut Fahri, UU KPK yang saat ini masih berlaku, ternyata sudah bermasalah. Semua orang, lanjut Fahri, yang terlibat dalam penyusunan UU tersebut sudah menyatakan perlu ada perubahan mendasar terhadap UU KPK. Tak tanggung-tanggung, Megawati, presiden yang saat UU ini diberlakukan sudah mengatakan KPK sebaiknya dibubarkan saja.

Begitu juga menteri yang menandatangani UU ini, Yusril Iha Mahendra berkata yang sama. Bahkan, pakar hukum Romli Atmasasmita pernah mengatakan, KPK berbahaya. Dalam pandangan politisi PKS tersebut, banyak kekeliruan mendasar yang dilakukan KPK. misalnya soal penyadapan. Aksi sadap sebetulnya hanya boleh dilakukan oleh BIN dan diperdengarkan oleh presiden. Bila kini, aksi sadap menjadi awal dari operasi tangkap tangan, itu keliru besar.

Dengan penyadapan itu, semua dicurigai. Bahkan, pimpi-



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

nan KPK sudah mengaku bahwa mereka menyadap semua orang untuk mendeteksi dini korupsi. “Ini bahaya dan jahat betul. Alat sadap sebagai alat pemberantasan korupsi, itu kelirunya luar biasa,” kilah Fahri lagi. Apalagi, selama ini kasus-kasus yang ditangani KPK tidak jelas. Korupsi daging, misalnya, sampai kini tak pernah terungkap siapa mafianya.

“Pertemanan, lobi, negosiasi semuanya dijadikan korupsi. Jadi ruang gerak bangsa kita ini makin sempit. Dipersempit oleh KPK. Inilah sumbangan kepada krisis sekarang ini, ketika pembangunan tidak jalan. Hubungan pejabat dengan masyarakat lainnya dibatasi.” (mh) foto: jaka/parle/hr.

PAW Anggota FPDIP; Dardiansyah Gantikan Adriansyah



Ketua DPR RI Setya Novanto menandatangani berita acara PAW

Fraksi PDI Perjuangan DPR melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Kamis (20/8). Anggota yang diganti adalah H. Adriansyah, sedangkan penggantinya adalah Drs. H. M. Dardiansyah dari Daerah Pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan II. Adriansyah diberhentikan dari DPR setelah partainya memecatnya lantaran terlibat kasus suap.

Dardiansyah dilantik sebagai anggota DPR berdasarkan Keppres No.60 tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015. Sejak DPR periode 2014-2019, acara pergantian antar waktu anggota DPR dilakukan bersamaan Sidang Paripurna, berbeda dengan sebelumnya acara PAW digelar secara khusus di *Operation Room*.



Ketua DPR Setya Novanto yang mendampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin acara pengambilan sumpah mengingatkan tugas anggota DPR bertanggung jawab terhadap rakyat dan menyelamatkan Pancasila serta UUD 1945.

“Saudara bersumpah, patut saya ingatkan, bahwa sumpah yang saudara ucapkan bertanggung jawab terhadap masyarakat Republik Indonesia, menyelamatkan Pancasila, UUD 1945. Sumpah ini adalah janji kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Novanto mengingatkan. (mp) foto: andri/parle/hr

Fadli Nilai Pidato Kenegaraan Presiden Terlalu Optimis



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi menyambut HUT Ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Parlemen.

“Kita disajikan impian kosong,” ujar Fadli Zon usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

“Secara ekonomi, Presiden optimis dan kita juga berharap demikian. Tetapi lebih baik kita bersiap-siap menghadapi satu kondisi yang lebih buruk, mengantisipasi jangan sampai nanti kita menganggap enteng situasi tetapi kenyataannya keadaan lebih berat bahkan tidak sanggup,” ungkap Fadli Zon.

“Lebih baik kita bersiap-siap dengan *over estimated* melihat keadaan atau konservatif, tegas Fadli Zon.

“Jika ada kejadian lebih buruk, misalnya pelemahan nilai tukar rupiah dari berbagai faktor. Misalnya devaluasi yuan, kita harus ada *sense of emergency* rasa kedaruratan, jangan semuanya dianggap enteng dan rakyat menjadi korban. Ini merupakan pelajaran yang berharga yang harus kita ambil dari pengalaman terdahulu,” jelas Fadli.

Pemerintah kata Fadli, masih menganggap enteng terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pemerintah masih optimis dengan pertumbuhan 7%, namun bagaimana caranya pertumbuhan itu. “Katanya nanti bulan September ekonomi akan meroket pertumbuhannya, namun bagaimana caranya,” tukas dia.

Pimpinan Dewan ini menekankan agar pemerintah jangan menyajikan impian kosong, lebih bagus dengan kenyataan pahit tetapi kita hadapi secara bersama. “Itulah persatuan, jangan bersatu untuk mimpi kosong, tetapi bersatu menghadapi kenyataan-kenyataan untuk menolong rakyat,” tutup Fadli. (skr) foto: andi/parle/hr

RAPBN 2016 Diharapkan Tingkatkan Kepercayaan Pasar

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih realistis sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan pasar yang lebih tinggi.

Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membacakan Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2016 Beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara, Jumat (14/08/15).

“RAPBN tahun 2016 disusun ber-

dasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengacu pada tema Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkuat kokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Penguatan pengelolaan fiskal diarahkan melalui sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” jelas Presiden.

Asumsi ekonomi makro tahun 2016, jelas Presiden, meliputi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 5,5 persen. Menurut Presiden, kondisi ekonomi global diproyeksikan membaik sehingga kinerja ekspor-

impor serta permintaan global atas produk-produk Indonesia juga meningkat. Pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto dan konsumsi nasional.

“Peningkatan konektivitas nasional dan realokasi belanja ke sektor-sektor produktif diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi,” imbuh Presiden.

Laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen. Besaran ini di-



Rapat Paripurna penyampaian RUU APBN 2016 beserta Nota Keuangan oleh Presiden RI

pengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim. Untuk itu, janji Presiden, Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan menggerakkan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi nasional.

“Berikutnya, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat. Perbaikan performa perekonomian global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan perlambatan

perekonomian Tiongkok, depresiasi yuan serta pemulihan ekonomi Uni Eropa dan Jepang, diperkirakan akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah tahun mendatang,” kata Presiden.

Asumsi berikutnya, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan diasumsikan berada pada tingkat 5,5 persen. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 60 dolar Amerika Serikat per barel.

“Kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,985 juta barel setara mi-

nyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 830 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,155 juta barel setara minyak per hari,” jelas Presiden.

Dari sisi pendapatan negara, tambah Presiden, pemberian insentif fiskal ditujukan untuk kegiatan ekonomi strategis guna mendukung iklim investasi dan dunia usaha. Kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah adalah optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.

“Di samping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan, dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen. (sf), foto : [naefurodjie/parle/hr.](#)

Transfer ke Daerah Capai Rekor Fantastis dalam RAPBN 2016

Anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, tahun ini merupakan pertama kalinya anggaran transfer ke daerah dan dana desa didalam RAPBN 2016 terbesar dalam sejarah anggaran di Indonesia. Kurang lebih Rp782.2 Triliun pemerintah akan menggelontorkan dana untuk transfer ke daerah dan desa.

“Transfer ke daerah dan desa ini sesuai Program Nawacita yang mengamanatkan membangun desa dari pinggiran, atau sebesar Rp. 40 Triliun untuk dana desa pada tahun 2016 mendatang,” ujarnya kepada parlemen-taria, Jum’at, (14/8).

Menurutnya, dana desa perlu pengawasan atau perlakuan khusus pendampingan agar dana tersebut tidak diselewengkan oleh aparat desa. “Yang harus menjadi perhatian dalam

3-4 bulan kedepan yaitu adanya penyelenggaraan Pilkada yang akan mengganggu penyerapan belanja modal kita,” ujarnya.

Dia mengharapkan perombakan kabinet dapat memperlancar transfer ke daerah dan menambah stimulus bagi perekonomian di daerah nantinya. “Dengan menteri yang baru dilantik kita mengharapkan menteri pada sektor ekonomi dapat mengejar target yang ada,” paparnya.

Saat Pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,5 persen. Kondisi ekonomi global diproyeksikan akan membaik sehingga kinerja ekspor-impor serta permintaan global atas produk Indonesia juga meningkat. “Pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kinerja pembentukan



Anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate

modal tetap bruto dan konsumsi nasional,” ujar Jokowi.

Sementara itu, laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen. yang dipengaruhi perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim. (Si) foto: [ry/parle/ra](#)



RAPBN 2016 Cenderung Konservatif

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, target produksi minyak bumi sebesar 830 ribu barel perhari dapat tercapai apabila *project* minyak di Indonesia tidak ada persoalan terhadap produksi minyak di Cepu, yang merupakan penyumbang utama dalam migas nasional.

“Asumsi makro sebesar 830 ribu barel itu merupakan batas atas dan harus menjadi perhatian pemerintah Joko Widodo,” jelasnya sesuai Pidato RAPBN 2016 beserta nota keuangannya di Gedung DPR, Jum’at, (14/8).

Satya mengatakan, pemerintah juga telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp121 triliun dan non energi sebesar Rp80.4 triliun. dimana dalam alokasi tersebut, lanjutnya, mencakup subsidi alokasi naik turunnya BBM. “Karena BBM kita akan dipatok dan

tidak mengikuti ekonomi pasar dalam kurun waktu tertentu, jadi tidak tertutup kemungkinan adanya subsidi disitu. Selain itu, alokasi subsidi energi juga memuat subsidi untuk elpiji, listrik, BBM, dan solar,” jelasnya.

Dia menambahkan, defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2016 mencapai Rp. 173 Triliun atau 2.1 persen terhadap PDB merupakan langkah konservatif dari pemerintahan Joko Widodo. “*overall* ini merupakan langkah konservatif dengan defisit anggaran sebesar 2.1 persen namun pemerintah tidak menyebutkan berapa besar *gini rasionya*,” paparnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah lebih memprioritaskan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782.2 triliun. “Ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan di daerah, sehingga



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha

provinsi dapat tumbuh dan berkembang yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara nasional,” jelasnya. (Si) foto:ry/parle/ry

Maraknya Kejahatan Transnasional di Asia Berawal dari Kemiskinan



Delegasi DPR pada sidang APA di Jakarta

Rapat pleno Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Asian Parliamentary Assembly (APA) menyepakati masalah kemiskinan di benua berpenduduk terbesar di dunia ini sangat serius. Maraknya kejahatan lintas negara terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat menghadapi beratnya himpitan kemiskinan.

“Kemiskinan ini harus diselesaikan bersama, saling mendukung sesama negara di kawasan ini karena kemiskinan adalah cikal bakal masalah teror-

isme, radikalisme yang banyak muncul, masalah narkoba, penyelundupan senjata dan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional lain,” kata anggota delegasi DPR Amelia Anggraini usai sidang di Hotel Intercontinental, Jakarta, Kamis (20/8/15).

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menambahkan parlemen perlu lebih aktif mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi masalah ini. Data dari Asian Development Bank pada tahun 2010 jumlah

penduduk miskin di benua terpadat di dunia ini mencapai 1,75 miliar orang.

Dalam pembahasan Draft Resolusi tentang Memberantas Kemiskinan, parlemen dari 22 negara Asia menyepakati sejumlah langkah diantaranya mendorong pemerintah masing-masing negara untuk mengadopsi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor*.

Dalam draf yang berhasil disepakati pada rapat pleno komisi hari kedua ini, parlemen di Asia didorong untuk menghadirkan produk legislasi yang mengacu pada tujuh poin. Tiga diantaranya adalah memperbaiki regulasi pasar tenaga kerja, mendorong berkembangnya sektor informal, membantu penduduk miskin memperbaiki lingkungan dan infrastruktur di sekitar tempat tinggal mereka.

Draf resolusi yang berisi 8 langkah memberantas kemiskinan ini akan segera disampaikan pada Sidang Pleno APA yang dijadwalkan berlangsung di Kamboja pada bulan Desember yang akan datang. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr

PERLU TEROBOSAN CAPAI TARGET RAPBN 2016



Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian dari Gerindra menilai target RAPBN 2016 akan sulit tercapai apabila tidak ada terobosan untuk mengejar target tersebut.

“Apa yang dikemukakan Presiden

harus disesuaikan secara operasional di lapangan bahkan kalau tidak disesuaikan maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, dan inflasi 4,7 persen akan sulit tercapai,” jelasnya.

Selain itu, papar Ramson, dirinya menilai tidak ada terobosan dari Pemerintah Jokowi untuk menutup defisit anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 273,2 Triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pemerintah tidak menyampaikan terobosan untuk mencari pembiayaan defisit yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp. 272,0 Triliun dan luar negeri neto sebesar Rp. 1,2 Triliun,” paparnya kepada Parlemen, Jum’at, (14/8).

Selain itu, lanjutnya, subsidi juga tidak dijelaskan secara rinci kebijakan apa yang dilakukan untuk menjalankan program subsidi tepat sasaran. “Subsidi tidak jelas, dan apa saja kebijakan yang dilakukan, ini kurang lengkap yang di-

ungkapkan hanya target asumsi mikro saja,” terangnya.

Pada kesempatan itu, pemerintah menyampaikan anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp. 2121,3 Triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1339,1 Triliun yang mencakup belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp. 780 Triliun dan belanja non kementerian atau lembaga sebesar Rp. 558 Triliun, serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 782,2 triliun.

Terkait alokasi transfer ke daerah, lanjut Ramson, dirinya meminta diperinci dan dioperasionalkan dana transfer ke daerah tersebut apakah termasuk UP2DP atau tidak. “Seharusnya dapat tergambar penurunan angka kemiskinan dalam pidato presiden itu,” tambahnya. (Si), foto : andrie/parle/hr.

Fadli Promosikan Kekayaan Pariwisata Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengajak anggota Delegasi APA untuk mengeksplorasi kekayaan pariwisata Indonesia yang indah dan penuh pesona. Ajakan ini disampaikan Fadli saat menjamu Delegasi Anggota Asian Parliamentary Assembly (APA), Rabu (19/8). Di Jakarta.

Fadli mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak terhingga, tidak hanya di Jakarta, kota yang sangat dinamis sebagai ibukota Negara, tetapi masih banyak daerah tujuan wisata lainnya yang tidak kalah menariknya.

Indonesia, kata Fadli, merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan berlimpah, panorama indah serta beragam budaya yang tersebar di lebih dari tujuh belas ribu pulau.

“Kami benar-benar berharap Anggota Delegasi APA dapat menikmati keindahan Indonesia selama tinggal di Jakarta,” kata Fadli.

Untuk memperlihatkan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam, malam itu Delegasi APA disuguhkan tarian tradisional yang dinamis dan menarik yakni tari Lenggang Jakarta, tarian khas dari daerah Jakarta, dan orkes keroncong Tugu.

Selain itu, delegasi APA juga disuguhkan makanan khas Indonesia, seperti rendang, makanan terkenal dari Padang, es pisang hijau, minuman terkenal dari daerah Sulawesi Se-



Persembahan tari Lenggang Jakarta saat menjamu anggota Delegasi APA

latan dan tidak ketinggalan minuman yang menghangatkan badan, wedang jahe.

Diakhir sambutannya, Fadli mengajak Anggota Delegasi APA bersulang bersama untuk kesuksesan dan masa depan yang lebih optimis menuju Asia makmur, dan penuh perdamaian. (tt)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Anggota Komisi V DPR Fauzih H. Amro

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura Fauzih H. Amro mengatakan Pidato Presiden RI Joko Widodo terkait RUU RAPBN 2016 diharapkan menjadi tonggak dalam meningkatkan sektor infrastruktur di Indonesia. Pada

SEKTOR INFRASTRUKTUR CAPAI RP313 TRILIUN

anggaran 2016 sekitar delapan persen memang diperuntukkan untuk infrastruktur atau sebesar 313 Triliun.

“Anggaran infrastruktur mengalami kenaikan hampir dua kali lipat atau sekitar Rp1 triliun yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan, jembatan dan waduk raksasa di era Joko Widodo,” ujarnya kepada Parlemen, Jum’at, (14/8).

Dirinya mengharapkan anggaran tahun 2016 juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring perbaikan di sektor infrastruktur. “Sekarang ini kondisi ekonomi sedang memburuk bahkan dollar sekitar Rp15

ribu, karena itu saya berharap dengan reshuffle kabinet juga dapat mempercepat kordinasi guna menumbuhkan kepercayaan dunia usaha,” jelasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah akan melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif yang nantinya anggaran itu akan ditutup oleh sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Dengan mempertimbangkan secara selektif sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang lebih rendah. (Si) foto:ry/parle/ry

Delegasi Sidang APA Ternyata Senang Goyang Dangdut

Suasana acara makan malam delegasi parlemen 22 negara peserta sidang Komite Tetap Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Asian Parliamentary Assembly (APA) menjadi lebih meriah. Momen ini terjadi ketika penyanyi dari Orkes Keroncong Tugu yang sedang membawakan lagu Kopi Dangdut versi keroncong mengajak delegasi dari Siprus untuk mencoba bergoyang dangdut bersamanya.

Gayung bersambut Mrs Stella Mishi-aouli Demetriou anggota parlemen dari Siprus ini segera bangkit dan dengan gaya sedikit kaku mencoba mengikuti goyang dangdut penyanyi perempuan di sampingnya. Aksi ini mendapat apresiasi tepuk tangan dari hadirin yang memenuhi ruang restoran Tugu Kunstkring Paleis, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/15)

“Ternyata goyang dangdut itu menyenangkan ya, saya sebenarnya juga suka bergoyang tapi kalau di Siprus gerakannya banyak dipengaruhi budaya Latin,” katanya usai acara dinner yang sengaja diselenggarakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai bentuk penghormatan kepada 105 anggota delegasi termasuk koleganya Wakil Ketua Parlemen Kamboja.

Keberanian anggota delegasi Siprus nampaknya membuat tuan rumah



Hiburan musik di sela-sela sidang APA di Jakarta

merasa sungkan untuk tidak ikut bergoyang dangdut. Akhirnya Fadli Zon bersama anggota delegasi lain seperti Melani Leimena Suharli, Teguh Juwano serta peserta sidang APA lain sama-sama mencoba bergoyang dangdut. Ini seperti melepas ketegangan ketika berdebat membahas dua draf resolusi beberapa jam sebelumnya.

Ketua BKSAP Nurhayati Ali Asefag kemudian menjelaskan kepada para delegasi, goyang dangdut adalah salah satu cara pendekatan politisi pada saat kampanye pemilu di Indonesia. Setelah bernyanyi dangdut dan berjo-

get bersama barulah suasana kampanye menjadi cair, saat itulah visi misi kandidat disampaikan.

Sebelumnya delegasi sidang APA juga sempat mengagumi gedung restoran yang merupakan cagar budaya yang dibangun Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1914. Gaya arsitektur Belanda terlihat nyata dan terawat dengan baik. Pada bagian depan terdapat tulisan *Immigrasie* karena gedung ini pada tahun 1950 memang digunakan sebagai kantor imigrasi. (iky) foto: iwan armanias/parle/iw

ASIA BERPERAN PENTING SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, meskipun negara-negara di Asia masih menghadapi tantangan berat di tahun 2015, namun Asia memiliki peran penting sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global. Hal itu disampaikan saat menjamu Anggota Asian Parliamentary Assembly (APA), Rabu (19/8) di Jakarta.

Fadli mengatakan, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Asia menun-

jukkan prestasi yang menggembirakan, namun masih banyak masalah yang harus diselesaikan, seperti ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan. "Permasalahan ini jika tidak diselesaikan akan dapat membahayakan perdamaian sosial dan menyebabkan kerusakan politik serta dapat merusak keberlangsungan pertumbuhan ekonomi," kata Fadli.

Ditambahkannya, Asia juga menghadapi tantangan yang signifikan seperti sumber daya alam yang menipis, dampak perubahan iklim, bahaya banjir dan lain sebagainya. Selain itu, 35% dari emisi karbon dioksida yang berhubungan dengan energi di seluruh dunia berasal dari negara berkembang di Asia, emisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 1990 sebesar 17%.

Menurut Fadli, pembangunan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di kawasan Asia. Langkah-langkah nyata dan bersifat terobosan dalam

serangkaian upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kiranya perlu diintegrasikan ke dalam strategi dan perencanaan pembangunan di kawasan ini. "Semua itu guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pasca-2015." ujarnya.

Dalam hal ini perlu dicarikan solusinya dan tidak ada jalan pintas dan solusi yang dapat dikerjakan dalam sekejap. "Solusi ini perlu dikerjakan secara maraton dan penuh kesabaran," tambahnya.

Masyarakat Asia menaruh harapan besar kepada Anggota Parlemen Asia untuk menjadikan Asia yang makmur dan penuh kedamaian. Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi diantara anggota parlemen sangat strategis dan membantu dalam mengatasi masalah di Asia.

Dalam hal ini, diperlukan implementasi konkret yang dapat bermanfaat untuk bangsa-bangsa Asia guna menuju Asia yang makmur dan damai. (tt)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR DAN PARLEMEN TIONGKOK BAHAS ISU BURUH MURAH

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara disela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.

"Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari

sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia," kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.



Anggota BKSAP DPR Charles Honoris

Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program *silk road* maritim yang sedang dikembangkan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.



“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpikan parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat *concern* pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas se-

suai rambu-rambu hukum yang ada,” tekannya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh

murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakannya dengan pemerintahnya. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Sidang APA Berhasil Tuntaskan 2 Draf Resolusi

Rapat pleno Komisi Tetap Bidang Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan *Asian Parliamentary Assembly* (APA) yang dipimpin Teguh Juwarno anggota delegasi dari DPR RI berhasil menuntaskan pembahasan dua draf resolusi. Dari lima draf yang dibicarakan dua dianggap berat yaitu Draf Resolusi tentang Pasar Energi Terintegrasi di Asia dan Draf Resolusi tentang Isu Lingkungan, Pemanasan Global, Pemanasan Iklim dan Penanaman Sejuta Pohon di Asia.

“Dua isu ini dianggap berat namun alhamdulillah sidang pleno komisi berhasil menyepakatinya, ini karena ada semangat yang sama dari parlemen anggota APA untuk bersatu membicarakan soal masa depan energi kita,” katanya kepada wartawan usai sidang di Ballroom Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Terkait isu Pasar Energi Terintegrasi menurut Wakil Ketua BKSAP ini, potensinya tidak diragukan karena 62 persen cadangan minyak dunia ada di Benua Asia. Demikian pula cadangan gas 64 persen dan batu bara sekitar 28 persen. “Dalam draf resolusi ini kita mendorong pemerintahan di Asia untuk membangun satu pasar yang terintegrasi agar kepastian ketersediaan energi terjamin, semata-mata untuk kesejahteraan warga bangsa Asia,” tuturnya.

DPR bersama parlemen dari 22 negara peserta sidang juga menilai isu lingkungan, pemanasan global dan upaya penanaman sejuta pohon di kawasan Asia harus dapat dituntaskan. Dalam kesempatan itu disepakati pula untuk membuat pelaporan secara berkala untuk memantau keberhasilan program.

Sementara itu Ketua Delegasi Thailand Jenderal Sakol Sajjanit mengingatkan keberhasilan sejumlah resolusi yang



Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno bersama Delegasi APA

telah disepakati tergantung peran aktif semua pihak yang kemudian membuat rantai kerja sama yang kuat antara parlemen, pemerintah dan APA. “Delegasi Thailand siap berbagi pengalaman dan pandangan untuk membangun *spirit* saling percaya yang lebih besar serta kerja sama diantara kita,” tegas dia.

Dalam sidang komisi tetap yang berlangsung di Jakarta 19-20 Agustus ada lima draf resolusi yang harus disepakati seluruh delegasi. Peraturan APA menyebut apabila ada satu delegasi saja punya pandangan berbeda, maka draf tersebut akan ditunda pembahasannya. Draf resolusi ini akan diputuskan menjadi Resolusi APA dalam sidang pleno yang dijadwalkan berlangsung di Kamboja akhir tahun ini. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Perekonomian Kawasan Asia Masih Menyisakan Persoalan Penting

Pertumbuhan ekonomi tahunan negara-negara di kawasan Asia masih menunjukkan kinerja yang menggemblirakan. Meskipun demikian, perekonomian kawasan ini masih menyisakan serangkaian persoalan penting ke depan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon me-

nyampaikan hal ini pada pembukaan Sidang *Asian Parliamentary Assembly* (APA) *Standing Committee on Economic and Sustainable Development*, di Jakarta (19/8).

Menurut Fadli, serangkaian persoalan ini dapat dilihat semakin tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat

akan semakin mempersulit upaya pengentasan kemiskinan penduduk.

Situasi seperti ini, katanya, jika dibiarkan dapat mengganggu soliditas sosial dan menciptakan keresahan politik, situasi yang pada akhirnya akan menggerogoti kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam jangka panjang.

Pendek kata, tantangan pertumbuhan ekonomi yang masih belum sepenuhnya inklusif merupakan pekerjaan rumah besar kawasan ini. Selain itu, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi kawasan ini pun masih menjadi persoalan yang harus segera dikelola dengan kemauan politik yang semakin besar.

Sebagaimana diketahui, cadangan sumber daya alam mineral penting

dan migas akan menyusut menjelang tahun 2050. Tantangan berat yang harus dikelola bersama-sama juga menyangkut nasib lebih dari 400 juta penduduk perkotaan Asia yang diperkirakan akan mengalami risiko banjir akibat peningkatan permukaan air tanah pada tahun 2025.

Selain itu, tambahnya, diperkirakan 35% emisi karbon yang berkaitan dengan penggunaan energi dunia dihasilkan oleh negara-negara di kawasan Asia, angka yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan emisi yang sama pada tahun 1990 yang hanya mencapai 17%.

Fadli mengatakan, pembangunan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan, langkah-langkah nyata dan

bersifat terobosan dalam serangkaian upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kiranya perlu diintegrasikan ke dalam strategi dan perencanaan pembangunan kawasan ini.

“Upaya ini semua tentunya diarahkan, tidak hanya untuk mengurangi beban biaya yang semakin besar jika terlambat menanganinya tapi yang lebih penting adalah untuk mengawal Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global,” kata Fadli.

Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development* kali ini mengusung tema : *Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity*. (tt), foto : [iwan armanias/parle/iw](#)

Parlemen Asia Dituntut Langkah Kerja Nyata dan Terukur



Wakil Ketua DPR Fadli Zon memukul gong didampingi Nurhayati Ali Assegaf

Anggota Parlemen Asia dituntut mampu merumuskan komitmen dan langkah-langkah kerja nyata dan terukur bersama untuk mendorong upaya sinergitas agenda pertumbuhan ekonomi dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan bagi terciptanya perdamaian dan kemakmuran.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada pidato pembukaan Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development*, di Jakarta (19/8).

Fadli mengatakan, tantangan yang dihadapi kawasan Asia yang merupakan benua terpadat dan terbesar dunia yang dihuni lebih dari 4,3 miliar penduduk atau sekitar 60% jumlah penduduk dunia tidaklah kecil dan multidimensional.

“Untuk itulah, Anggota Parlemen Asia berkumpul dalam rangka kerja sama antar parlemen se-Asia untuk mampu merumuskan komitmen dan langkah-langkah kerja nyata dan terukur,” kata Fadli.

Fadli berharap pertemuan dua hari ini akan menghasilkan draf-draf resolusi yang memberikan kekuatan baru dan pendekatan yang lebih efektif dalam rangka mencapai tujuan.

Berbagai draf resolusi yang akan dibahas dalam sidang Komisi APA ini, akan dibawa dalam sidang pleno APA ke-8 mendatang di Kamboja. Dalam kaitan ini, Indonesia mengusulkan satu draf resolusi penting terkait dengan pentingnya peran anggota parlemen APA atas isu SDGs. Indonesia memandang ini hal yang sangat penting untuk parlemen Asia guna mengambil peran besar menjamin realisasi SDGs.

Fadli menambahkan, pada pertemuan sebelumnya, APA telah banyak membahas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. “Sudah banyak resolusi dan deklarasi yang kita hasilkan,” katanya.

Namun demikian, tambahnya, secara jujur harus mengakui bahwa belum banyak kemajuan yang berhasil kita capai dalam kerangka kerja sama APA. “Di sinilah, simpul persoalan yang harus kita pikirkan bersama dengan target output yang terukur dan bermanfaat nyata bagi rakyat Asia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli mengatakan, rakyat Asia banyak menggantungkan harapan kepada anggota APA untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang penuh kemakmuran, perdamaian dan penuh persahabatan. Untuk itu, APA harus menjadi bagian efektif dari tujuan besar dan mulia tersebut.

Sidang APA yang berlangsung selama dua hari ini (19-20 Agustus) diikuti 21 negara yakni, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Cyprus, India, Indonesia, Islamic Republic of Iran, Jordan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Malaysia, Maldives, Pakistan, Palestina, Philippines dan Thailand. (tt), foto : [iwan armanias/parle/iw](#)



DPR Sampaikan Belasungkawa Pada Delegasi Thailand

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan belasungkawa atas teror bom yang menewaskan 27 orang, dua diantaranya Warga Negara Indonesia di Kuil Erawan, Bangkok, Thailand. Ungkapan duka itu disampaikan langsung kepada Delegasi Thailand yang hadir pada sidang *Standing Committee* tentang Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Majelis Parlemen Asia di Jakarta 19-20 Agustus.

“Saya menyampaikan keprihatinan atas aksi terorisme di Thailand dan kita sudah sampaikan belasungkawa langsung kepada Ketua Delegasi Thailand Jenderal Sakon Sajjanit,” katanya kepada wartawan usai pembukaan sidang di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini mengecam aksi teror yang tidak berperikemanusiaan ini dan berharap pihak berwenang di Thailand dapat mengungkap dalang dibalik aksi keji yang melukai ratusan orang ini. Ia juga secara khusus menyampaikan catatan keprihatinan karena aksi seperti ini terjadi di sejumlah negara di Asia.

“Aksi teror ini banyak terjadi di Asia seperti di Suriah, Iraq, Yaman dan negara lain. Kita harap ini bisa selesai, kalau semua damai kondisi Asia akan menjadi jauh lebih baik,” lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya dalam upacara pembukaan Deputy Sekjen APA Ali Khorram mengajak seluruh peserta sidang untuk mengheningkan cipta, mendoakan korban aksi terorisme



Wakil Ketua DPR Fadli Zon berjabat tangan dengan Ketua Delegasi Thailand

yang terjadi di kawasan Asia. Anggota parlemen Asia dari 22 negara serentak berdiri, berdoa menurut agama masing-masing selama satu menit.

Anggota delegasi parlemen Thailand Amorntep Na Bangchang menyampaikan apresiasi atas doa dan dukungan dari DPR serta seluruh delegasi sidang APA. “Saatnya kita bekerja sama lebih kuat agar aksi teror seperti ini tidak lagi mempunyai ruang di kawasan Asia,” tutur dia. (iky) foto: iwan armanias/parle/iw

KISRUH JK-RIZAL RAMLI KONTRAPRODUKTIF



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

Kisruh antara Wakil Presiden Yusuf Kalla dengan Menko Perekonomian Rizal Ramli tentang program pembangkit listrik 35.000 MW itu sangat kontraproduktif dengan pidato Presiden yang menggarisbawahi perlunya

kekompakan dalam mewujudkan visi pembangunan 5 tahun ke depan.

“Ini aneh sekaligus lucu. Presiden pidato A, orang-orang terdekat Presiden bertindak B. Mestinya lingkaran istana memberi contoh. Kalau terus-terusan seperti itu, kapan kerjanya? *Leadership* Presiden akan terus diragukan dan dipertanyakan,” ungkap anggota DPR Heri Gunawan, Rabu (19/8) malam, usai Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Menurutnya, terkait usulan debat publik tentang program pembangunan 35.000 MW, perlu didorong. Kalau memang ada yang keliru, dibuka saja ke publik, biar publik tahu persis akar permasalahannya. Debat publik itu akan memberi pencerahan-pencerahan kepada rakyat, sejauh mana kelayakan program 35.000 M sekaligus plus dan minusnya.

Isu listrik nasional ini adalah isu yang

penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Publik berhak tahu sejauh mana program pembangunan listrik 35.000 MW itu bisa berhasil, memang program ini termasuk di dalamnya adalah program 10.000 MW.

“Harus jelas sumber-pendanaannya bagaimana, siapa-siapa operatornya, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional, dan lain-lain. Itu semua harus dibuka ke publik. Kalau perlu dibuatkan portal khusus untuk membahas soal tersebut, sehingga publik merasa dilibatkan dan bisa melakukan pengawasan dengan maksimal,” tegas Wakil Ketua Komisi VI ini.

Ditambahkan, banyak persoalan yang harus dibuka kepada publik. Dari gagalnya program 10.000 MW tahap 1 dan 2 termasuk rencana China untuk sewa pembangkit-pembangkit PLN (*lease-back*) yang sangat berbahaya

dan mengancam kedaulatan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra menegaskan, sebelum program 35.000 MW dijalankan, baiknya publik diberi tahu tentang gagalnya program 10.000 MW oleh China. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi.

“Pemerintah jangan tunduk terus sama China. Bukannya meminta pertanggungjawaban kegagalan China, Pemerintah justru memberikan keistimewaan ke China untuk sewa-ulang pembangkit-pembangkit milik PLN,” tandas Heri dengan menambahkan,

ujungnyanya, PLN tidak akan pernah mandiri, bahkan fungsinya menjadi kerdil. Hanya sebatas BUMN penyedia jasa listrik, dan listrik kita akan dikendalikan asing serta seenaknya menaikkan TDL. (spy,mp) foto: iwan armanias/parle/iw

Pemerintah Perlu Bantu Promosi dan Peningkatan Fasilitas Wisata NTT



Tim Kunker Komisi X saat berkunjung ke NTT

Pemerintah diminta membantu promosi dan fasilitas wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah ini terdapat obyek-obyek wisata kelas dunia seperti Pulau Komodo, ombak dan taman laut terbaik Alor, Labuhan Bajo dan Pulau Komodo, serta danau tiga warna Kelimutu.

“Jadi sudah tepat bila Gubernur NTT telah mencanangkan NTT sebagai Provinsi Pariwisata. Tinggal bagaimana meningkatkan fasilitas dan kualitas infrastruktur termasuk transportasi antar daerah wisata,” kata anggota Komisi X DPR Yunico Siahaan.

Politisi PDI Perjuangan yang mengikuti kunjungan kerja Komisi X DPR baru-baru ini ke Provinsi NTT menilai, Pemprov jelas punya keterbatasan karena APBD dan PAD kecil, sehingga kalau andalkan promosi sendiri akan sulit. Karena itu pemerintah harus bantu, dan dia mendesak Kementerian Pariwisata, Kemendikbud dan Kemenpora untuk memberikan pelatihan.

“Intinya pusat harus ambil peran, dan saatnya teman-teman Komisi X menekan pemerintah untuk memberikan pelatihan yang lebih secara proporsional. Justru karena kurangnya PAD harus dibantu pemerintah pusat,” tegas mantan presenter yang akrab dipanggil Nico Siahaan ini.

Juga masalah air, Nico menilai Presiden Jokowi yang menacitakan pembangunan dua bendungan di NTT sangat tepat. Khususnya kota Kupang harus dibantu air, kalau air bagus kegiatan ekonomi bergerak termasuk bisnis hortikultura akan jalan, akhirnya bisa meningkatkan PAD di tengah karang yang hitam ini. “Pemerintah harus beri perhatian lebih besar bagi NTT dan Kupang,” katanya.

Di bidang pendidikan, ia mengaku miris melihat sarana dan prasarana pendidikan di NTT, bagaimana para pendidik dan pelajar berjuang untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Dengan minimnya fasilitas namun tetap semangat belajar dan mengajar, maka mestinya pemerintah harus bersikap lebih adil. Proporsionalitas harus terus didorong, bukan karena sumbangan daerah terhadap pendapatan negara, tapi bagaimana setiap daerah mendapat support cukup dari pemerintah. (mp) foto: mastur/parle/hr

TAX HOLIDAY TAK JAMIN TARIK FDI

Pemberlakuan *tax holiday* tak menjamin dapat mendatangkan *Foreign Direct Investment* (FDI), atau investasi asing yang bersifat langsung. Banyak kajian telah membuktikan bahwa insentif pajak melalui *tax holiday* dinilai tidak efektif dalam menarik FDI, bahkan sarat dengan praktik penyelewengan dan korupsi.

Demikian mengemuka saat Diskusi tentang RAPBN 2016 yang diselenggarakan oleh Bagian Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Rabu (19/08/15). Diskusi dibuka oleh Plt. Kepala Bagian Analisa APBN, Mardi Harjo.

Diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Darussalam

dan Bawono Kristiaji. Keduanya merupakan konsultan pajak dari Danny Darussalam Tax Center, yang berbasis di Kelapa Gading, Jakarta.

“Investasi yang akan masuk ke Indonesia melalui beberapa faktor, pajak menjadi salah satunya. Namun, dari penelitian di negara-negara Afrika, dari 12 faktor yang menentukan apakah suatu investasi akan masuk atau tidak, insentif pajak hanya berada di urutan 11 dari 12 faktor itu,” jelas Darussalam, usai acara.

Artinya, tambah Darussalam, ada faktor lain yang sangat signifikan dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, stabilitas politik dan ekonomi, biaya bahan baku yang murah, sumber daya manusia yang terampil,



Para pembicara dalam diskusi RAPBN 2016

serta faktor pasar domestik yang luas, akan menjadi bahan pertimbangan utama para investor.

“Jangan sampai tax holiday menjadi kompensasi karena buruknya sektor atau faktor-faktor lainnya. Tax holiday hanya menjadi bonus bagi investor,” tegas Darussalam.

Justru dengan semakin lamanya diterapkan tax holiday, dikhawatirkan akan menghilangkan potensi pajak yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

“Menurut saya penerapan tax holiday cukup sewajarnya saja, jangan sampai selama 20 tahun, seperti yang akan kita

adopsi. Hal ini agar *potential loss* dari pajak tidak banyak yang hilang,” imbuh Darussalam.

Apalagi, landasan hukum dari penerapan *tax holiday* masih belum cukup kuat. Selama ini, *tax holiday* hanya berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 1967, yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 1 Tahun 1967. Seiring berjalannya waktu, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi landasan hukum penerapan *tax holiday*.

“Tax holiday yang ada di kita ternyata hanya ada di UU Penanaman Modal. Dalam UU Pajak, tidak ada fasilitas *tax holiday*, sehingga ini menjadi ambigu. Menurut saya, pengaturan *tax holiday*, seharusnya ada di dalam UU perpajakan,” jelas Darussalam.

Untuk itu, ia mendorong agar pengaturan *tax holiday* dimasukkan ke dalam UU PPh. Apalagi, direncanakan tahun depan DPR akan merevisi UU PPh. Sehingga, penerapan *tax holiday* mempunyai landasan hukum yang lebih kuat.

“Supaya acuan yuridisnya kuat, silahkan turunannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan. Ini harus sejalan, karena yang namanya pajak acuan hukumnya berasal dari ranah pajak juga sebagai *lex specialis* dibanding dengan UU yang lain,” tutup Darussalam, sembari berharap hal ini akan menjadi perhatian DPR dan Pemerintah.

Diskusi ini diikuti oleh para Analis dan Peneliti di lingkungan Setjen DPR RI, dan Tenaga Ahli Komisi DPR maupun Anggota Dewan. (sf,ctr,dhi) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi IX DPR Terima Kunjungan Delegasi Majelis Nasional Parlemen Kamboja

Komisi IX DPR RI hari ini, Rabu (19/8/2015) menerima kunjungan delegasi Anggota Komisi VIII Majelis Nasional Parlemen Kamboja yang dipimpin Ketua Komisi Mrs. Ke Sovannroth didampingi Wakil Ketua Komisi Mr. Pae Sam Oeurn dan delapan anggota, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta.

Delegasi Komisi VIII Majelis Nasional Parlemen Kamboja yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, anak, perempuan dan veteran diterima Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi didampingi Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur dan beberapa anggota Komisi IX DPR RI.

Menurut Dede Yusuf, Komisi VIII Majelis Nasional Parlemen Kamboja berkunjung ke Komisi IX DPR RI adalah dalam rangka melakukan studi banding mengenai Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan (*Universal Health Coverage*).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi VIII Majelis Nasional Parlemen



Ketua Komisi IX Dede Yusuf saat menerima Delegasi Parlemen Kamboja

Kamboja menyatakan bahwa kedatangannya ke Komisi IX DPR RI adalah untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai BPJS.

“Kami senang dan bangga berada di sini untuk dapat bertukar pikiran

dan pengalaman dari Komisi IX DPR RI. Kami juga ingin melakukan sesuatu yang berhasil seperti yang telah dilakukan Indonesia yaitu BPJS,” kata Mrs. Ke Sovannroth. (sc) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi II Terima Pengaduan Koalisi Majapahit

Komisi II DPR RI menerima audiensi perwakilan Koalisi Majapahit, terkait proses pencalonan Walikota Surabaya. DPR menginginkan tahapan pelaksanaan pilkada serentak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Komisi II akan menampung aduan dan masukan-masukan ini, kemudian akan dikonfirmasi dalam Rapat dengan KPU, agar KPU berbuat obyektif dan punya legalitas,” kata Dadang S. Muchtar, Selasa (18/8), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ketua DPD Golkar Surabaya Mohammad Alias, Ketua DPC Gerindra Surabaya Suradi, Sekretaris DPD PKS Surabaya Achmad Zakaria, anggota pokja M Sholeh dan AH Thony yang tergabung dalam Koalisi Majapahit.

AH. Thony mengatakan datang kepada Komisi II untuk menyampaikan dan melaporkan permasalahan sikap KPU

Kota Surabaya yang melaksanakan proses tahapan pendaftaran walikota, yang tidak sesuai dengan aturan.

Menurut Koalisi Majapahit, beberapa hal itu diantaranya, pertama KPU menerima pendaftaran paslon dengan persyaratan hanya melampirkan rekomendasi dari partai tapi dalam bentuk scanner. Kedua, KPU juga menerima atau mentelorsani tentang masalah penandatanganan pendaftaran yang hanya dilakukan oleh wakil sekretaris, semestinya ketua dan sekretaris. Selain itu, KPU Surabaya dianggap tidak mentaati waktu pendaftaran, yang semestinya ditutup pukul 16.00 tapi ditambah hingga pukul 23.00 kemudian ditambah beberapa hari lagi.

Dia menegaskan, penerimaan pendaftaran paslon juga harus memenuhi 3 unsur, yaitu adanya suatu kepemimpinan partai yang sah, jumlah kuota



Anggota Komisi II DPR Dadang S. Muchtar

kursi (Surabaya 10 kursi).

“Kami melihat ini hal serius, sudah kita ingatkan dan tampaknya KPU tetap meneruskan, dikhawatirkan persoalan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, maka kita beraudiensi dengan Komisi II DPR. Harapan kita Komisi II dapat membenahi dari tingkat Panwas,” katanya. (as) foto: denus/parle/hr

Pemerintah Kecolongan Munculnya Atribut PKI

Dirgahayu Hari Ulang Tahun Indonesia ke-70 sedikit ternodai akibat munculnya atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) saat karnaval kemerdekaan, di Pamekasan, Madura. Hal ini menandakan Pemerintah dan aparat penegak hukum kecolongan.

“Ini kecolongan. Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi,” tegas Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, saat ditemui usai acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Selasa (18/08/15).

Politisi F-PAN ini menilai, sebenarnya atribut ini hanya tugas yang diberikan sekolah kepada anak muridnya, terkait perjalanan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ada G30S/PKI.

“Cuma kemudian dimunculkan secara vulgar oleh murid-murid, mungkin niatnya murid hanya menjalankan tugas, namun bisa ditafsirkan berbeda oleh publik,” imbuh Hanafi.

Politisi asal Dapil Yogyakarta ini menegaskan, kejadian seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Karena bisa menjadi masalah yang berbahaya di kemudian hari.

“Karena jika hal semacam ini dibiarkan begitu saja, itu bisa menjadi tanda buat orang lain yang memang selama ini berafiliasi ke komunisme, jadi beranggapan hal ini lumrah terjadi. Sehingga ketika hal yang lebih lagi terjadi, kita bisa kecolongan,” pesan anak kedua dari Politisi Senior, Amin Rais ini.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Fadli menilai, munculnya atribut berlambang palu arit itu merupakan penistaan kemerdekaan RI. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan tindakan, jangan sampai ada pembiaran yang berakibat kejadian ini bisa terjadi di mana saja.

“Ini Pemerintah dan pihak aparat penegak hukum saya kira telah kecolongan. Aparat penegak hukum ha-

rus mengambil langkah-langkah. Jelas ini pelanggaran hukum, dan kita tak bisa mentolerir ini terjadi,” tegas Fadli.

Politisi F-Gerindra ini menganggap, munculnya lambang komunis merupakan pelanggaran, karena sudah ada dalam Ketetapan MPR RI Nomor 25 tahun 1966, bahwa yang terkait dengan ajaran dan lambang komunis dilarang.

“Sebenarnya Pemerintah dan aparat sudah tahu apa yang harus dilakukan, mereka sudah tahu rambunya seperti apa. Tinggal bagaimana penegakkannya, jangan sampai ini terjadi pembiaran kemudian muncul di daerah, ini yang harus dicegah,” pesan Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Berdasarkan info yang dihimpun dari berbagai media, peserta karnaval yang membawa atribut bergambar palu arit tersebut diduga dari musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) tingkat SMP Kabupaten Pamekasan. Saat karnaval, peserta membawa banner yang berisi foto tokoh PKI dan lambang PKI, palu arit.



Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais



Info terbaru, Bupati Pamekasan Achmat Syafi'i sudah menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Presiden Joko Widodo terkait hal

ini. Selain kepada Presiden, permintaan maaf juga ditembuskan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung,

Panglima Daerah Militer V/Brawijaya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Timur. (sf), foto : denus/parle/hr.

KOMISI VIII SESALKAN ADANYA BIAYA TAMBAHAN PASPOR HAJI

Komisi VIII DPR RI menyesalkan adanya permintaan biaya tambahan pembuatan Paspor Haji yang dialami masyarakat Sumatera Utara. Hal tersebut terungkap ketika Komisi VIII DPR mendatangi Kabupaten Padang Sidempuan baru-baru ini.

“Pada waktu kunker Komisi VIII ke Dapil Sumut II minggu lalu, kami mendengar laporan dari masyarakat tentang biaya tambahan pembuatan paspor. Kami tentu terkejut mendengar hal itu. Sebab, alokasi anggaran untuk penyediaan paspor jamaah telah ada dalam komponen BPIH,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Ketika Saleh mengkonfirmasi hal itu ke Dirjen haji, dilanjutkannya, Dirjen Haji mengamini hal itu. Jamaah haji memang diminta untuk menalangi terlebih dahulu anggaran untuk paspor, baru setelah paspor jadi, Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota akan mengembalikan biaya tersebut ke jamaah (*reimburse*).

Disini Politisi Fraksi Partai PAN ini menilai bukan permasalahan *reimburse*, melainkan adanya tambahan di luar biaya resmi pembuatan paspor. Sejatinya biaya resmi paspor sebesar Rp360 ribu rupiah, namun jamaah harus membayar lebih dari itu, yakni sekitar Rp380-400 ribu rupiah. Dan biaya yang



Ketua Komisi VIII Saleh P. Daulay

dikembalikan kepada jamaah hanya Rp360 ribu rupiah.

“Walaupun selisihnya antara Rp20 - 40 ribu, namun jika dikalikan dengan jumlah jamaah yang mengurus paspor, nilainya tetap signifikan,” katanya.

Kantor Kementerian Agama setempat sempat menjelaskan bahwa permintaan tambahan itu datang dari pihak imigrasi. Hal ini sangat membingungkan sebab biaya pembuatan Paspor resmi 360 ribu rupiah itu sebenarnya sudah diserahkan kepada imigrasi. Sementara tambahan biaya sekitar 20-40 ribu tidak jelas penggunaannya.

“Saya sudah meminta pada Dirjen Haji untuk mengecek hal ini di lapangan. Ini penting untuk mencegah saling curiga dan saling tuduh. Lebih dari itu, kami (Komisi VIII) juga meminta Kementerian Agama untuk mengawasi lebih ketat seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji,” tegasnya.

(Ayu), foto : ayu/parle/hr.

KOMISI VIII APRESIASI DUKUNGAN PENYANDANG DISABILITAS



Komisi VIII menerima perwakilan penyandang disabilitas

Usai menggelar karnaval budaya di bundaran Hotel Indonesia (HI) sekitar 500 penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Disabilitas Nasional, Selasa, (18/8/2015) mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta.

“Kedatangan kami ke Komisi VIII ini tidak lain adalah

untuk mendorong DPR agar segera mengesahkan RUU Disabilitas,” jelas Mahmud Fasha, salah seorang perwakilan dari FKPCTI (Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia).

Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Disabilitas, Ledia Hanifa Amalia menerima perwakilan dari 12 organisasi disabilitas seperti PPD (Persatuan penyandang disabilitas Indonesia), PPUA Penca (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat) serta FKPCTI (Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia) ini mengapresiasi dukungan dari para penyandang disabilitas.

Ledia yang didampingi oleh beberapa anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, seperti Desy Ratnasari, Maman Imanulhaq, Arzeti Bilbina, Amri Tuasikal, Itet Tridjajati Sumarjianto, serta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sekaligus menjelaskan kepada perwakilan penyandang disabilitas akan mekanisme pembahasan dan penyusunan undang-undang di DPR yang juga melibatkan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) lainnya.

“Sejatinya draft RUU Penyandang Disabilitas ini masih terus kami susun, dan masukan dari teman-teman penyandang disabilitas juga telah kami masukkan dalam draft tersebut. Kami menargetkan sebelum September 2015 draft ini bisa diselesaikan dan bisa langsung masuk ke Badan legislasi (Baleg) DPR RI untuk diharmonisasi dan kemudian bisa disahkan,” jelas Ledia.

Dilanjutkan Ledia, yang paling utama dan paling *urgent* bagi para penyandang disabilitas adalah dengan perubahan paradigma dari pemerintah dan masyarakat akan penyandang disabilitas. Dengan adanya perubahan *mindset* atau paradigma maka akan berlanjut pada penyeteraan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas, tentu lewat kualifikasi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

“Sebut saja ketika penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun dengan kualifikasi atau persyaratan yang tidak dimiliki oleh penyandang disabilitas. Ini tentu akan sangat sia-sia. Misalnya, ada penyandang tuna netra yang menjadi PNS namun ditempatkan pada pekerjaan sebagai guru disain grafis bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara. Ini kan tentu sangat sia-sia,” papar Politisi dari Fraksi PKS ini.

Pada kesempatan itu Komisi VIII menerima petisi *online* dan *non online* berbentuk buku dari penyandang disabilitas seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui sejak beberapa bulan lalu, koalisi organisasi disabilitas nasional membuat sebuah gerakan yang dinamakan “Bergerak untuk Disabilitas”. (Ayu), foto : [naefurodjie/parle/hr](#).

Dewan Harap Pemerintah Kaji Masalah Tenaga Kerja Asing

Terkait banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama dari China yang masuk ke Indonesia akhir-akhir ini, Komisi IX DPR RI berharap pemerintah mengkaji betul tentang masalah ini.

“Dengan kesulitan yang ada sekarang dimana pengangguran cukup tinggi, kemudian *skill* itukan kita masih punya. Kecuali memang ada *skill* yang kita tidak punya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa diterima,” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena di Gedung DPR RI, Jakarta, beberapa hari lalu.

“Kalau sekarang kan tidak, ini kalau hanya kemampuan-kemampuan biasa yang bisa dilakukan tenaga kerja kita yang lain dengan tingkat pengang-

guran kita yang masih cukup tinggi, pemerintah harus mengevaluasi masalah ini,” tambahnya.

Ia berharap, masalah TKA ini tidak menjadi kebijakan yang kemudian mempersulit anak bangsa sendiri.

“Sebut saja untuk tenaga kerja di bidang pertambangan, kalau saja kita bisa memperbanyak fasilitas-fasilitas pendidikan untuk pertambangan, maka sebagian besar pertambangan di Indonesia seharusnya untuk *middle* ke atas itu sudah bisa diisi oleh anak-anak bangsa,” papar politisi dari Fraksi PPP ini.

Tapi kenyataan di lapangan, ungkap Ermalena, posisi *middle* ke atas tersebut masih diisi tenaga kerja dari luar.



Wakil Ketua Komisi IX Ermalena

Ia berharap hal ini bisa dilakukan pembicaraan secara serius dengan Komisi X DPR RI bidang pendidikan. (sc), foto : [iwan armanias/parle/hr](#).

DPR HARAP RUU PERTANAHAN ATASI SENGGKETA TANAH

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria berharap RUU Pertanahan dan Agraria yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI bersama pemerintah bisa menjawab segala permasalahan dan sengketa tanah. Dari Hak Kepemilikan, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), penguasaan tanah oleh asing, pembangunan properti dan waris, hak ulayat, hak komunal (adat), tanah wakaf untuk rumah ibadah, dan sebagainya. Semua perlu pengaturan agar UU ini berpihak untuk keadilan rakyat.

“Tanah negara dan tanah rakyat sekarang ini banyak yang sudah beralih fungsi menjadi hotel, apartemen, properti, pabrik, industri, perkebunan, pertambangan dan wisata. Itulah yang perlu pengaturan, karena ke depan rakyat akan bertambah besar dan membutuhkan lahan rumah dan pangan yang juga cukup besar,” tegas Ahmad Riza Patria dalam diskusi ‘RUU Pertanahan dan Agraria’ bersama Menteri



Menteri Agraria dan Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan dan Wakil Ketua Komisi II Riza Patria

Pertanahan dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, dan Pakar Pertanahan dan Tata Ruang Yayat Supriatna di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/8).

Karena itu kata Riza, DPR pada minggu depan akan mengundang para ahli dan pakar dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi, agar RUU ini mampu menjawab berbagai masalah pertanahan rakyat tersebut. “Pak Menteri Ferry Mursyidan yang dekat dan terbuka kepada rakyat diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertanahan, karena tahu dan mendengar semua masalah secara langsung dari rakyat dan bisa mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Apalagi menurut politisi Gerindra itu, banyak ketimpangan tanah terkait struktur, pemanfaatan, hak guna, kepemilikan asing dan sebagainya. Karena itu dia mendukung adanya peradilan khusus tanah, karena dipastikan akan berjalan mengingat masalah tanah ini sangat kompleks dan sebesar 65 % kasus tanah itu ada di pengadilan.

Menurut Ferry, tak ada masalah tanah yang rumit kecuali dirumitkan. Karena sebagai menteri dirinya bertekad memperbaiki sistem penyelesaian berbagai macam kasus tanah tersebut. “Secara garis besar ada tiga kasus tanah; yaitu banyak orang membeli tanah bukan melalui pemilik sertifikat, tanpa mengecek ke BPN. Kedua, ada sekelompok orang berpura-pura bertengkar untuk merebut tanah orang, dan ketiga di pengadilan yang dituntut adalah pidananya, bukan perdata, maka kalah di pengadilan,” jelasnya.

Menyinggung kepemilikan asing, menurutnya, itu diperbolehkan sebagai hak pakai sesuai ijin tinggal di Indonesia. “Orang asing boleh memiliki rumah hanya sebatas ijin ting-

gal dan bisa diwariskan kepada keluarganya selama tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di luar negeri, maka rumah, apartemen dan tanah itu harus dijual ke negara. Hal itu agar kalau ada manfaat ekonomi dari kepemilikan asing tersebut tidak lari ke luar negeri,” pungkasnya.

Pakar Pertanahan dan Tata Ruang Yayat Supriatna menegaskan, jika dengan RUU ini pemerintah hadir dan kalau serius dilaksanakan, maka program Nawacita yang dijanjikan Jokowi akan mulai terwujud. Sebab, dengan UU Pertanahan ini, tanah itu akan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Di mana di dalam tanah ini ada pertambangan, mineral, minyak, dan sebagainya, sehingga jangan sampai dikhianati dengan UU atau Perda sektoral.

“Jadi, RUU ini harus segera diselesaikan karena saat ini ada konflik 3,7 juta hektar tanah rakyat. Kalau tidak, maka akan bertambah rumit, pembangunan jalan dan tata ruang terhambat. Karena itu, RUU ini juga harus mempertegas definisi tanah negara, Hak Pengelolaan Lahan (HPL), banyak tanah dikuasai BUMN, tapi BUMN kerjasama dengan pihak ketiga-swasta, dan pihak ketiga kemudian membelinya dengan sertifikat hak milik serta membangunnya untuk properti atau industri dan lain-lain,” tambahnya.

Karena itu kata Yayat, pengesahan RUU ini sangat mendesak (*lex specialist*). Negara (BPN) jangan hanya menjadi tukang catat administrasi, melainkan harus melakukan pemantauan dan penyelesaian dengan turun langsung ke lapangan. “Bukan hanya administratif, mengingat tanah sudah menjadi komoditas,” pungkasnya. (nt/sc), foto : andri/parle/hr.

STIGMA NEGATIF NTT HARUS DIHAPUS



Tim Kunker Komisi X saat meninjau ruangan sekolah yang rusak di Kupang Timur, NTT

Kesan negatif terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini dikenal sebagai daerah yang kering, tandus sehingga masyarakatnya dalam kondisi kemiskinan dan ketertinggalan harus dihapus. Provinsi NTT yang sering diidentikkan dengan Nasib Tidak Tentu (NTT) dan Nanti Tuhan Tolong (NTT) harus diganti Nasib Terus Top (NTT).

“Saya tidak setuju dengan stigma negatif tersebut dan harus segera dihapus. Pasalnya potensi NTT baik sumber daya alam (SDA), pariwisata maupun kebudayaan sangat

menjanjikan,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR Nuroji saat menggelar pertemuan dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan jajaran, pekan lalu di Kupang.

Tim kunker Komisi X dalam rangkaian acaranya selain mengadakan pertemuan dengan Gubernur juga meninjau sekolah-sekolah rusak seperti SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Kupang Timur, juga SD Negeri Kelapa Tinggi Kupang Tengah, Kantor Perpustakaan Provinsi serta mengunjungi wisata Pantai Lasiana dan berdialog dengan kalangan Perguruan Tinggi di Universitas Nusa Cendana Kupang.

Dalam kunjungan dan berdialog dengan masyarakat serta anak-anak sekolah, kata Nuroji, disambut dengan wajah-wajah ceria dan bernyanyi penuh semangat. “Tidak ada gambaran pesimis, semua optimis dan semangat untuk membangun,” tegasnya.

Bersama anggota DPR asal NTT Jefirstson Riwu Kore, kata Nuroji dalam rapat kerja dengan pemerintah selalu memperjuangkan NTT khususnya untuk pendidikan yang merata dan berkeadilan. Daerah tertinggal seperti NTT yang PAD dan APBDnya rendah selayaknya diberi lebih banyak. “Pemerataan tidak harus sama rata, tetapi melihat kebutuhan dan ketertinggalan masing-masing provinsi,” ungkapnyanya dengan menambahkan bahwa DPR harus berpihak pada daerah-daerah yang membutuhkan. (mp)/foto:mastur/parle/jw.

Komisi VIII Terima Pengaduan Soal Kemenag



Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq

Komisi VIII DPR RI menerima banyak pengaduan terkait kinerja salah satu mitra kerjanya, Kementerian Agama dari masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara. Hal tersebut berlangsung saat Komisi ini mengunjungi Padang Sidempuan, Tapanuli Sumatera Utara, baru-baru ini.

Kepala Dinas Kementerian Agama di Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengadukan adanya beberapa guru dan staf Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di kabupaten tersebut yang belum mendapatkan honor. Padahal guru agama di sekolah umum yang notabene berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi sudah mendapatkannya. Ia berharap agar pemerintah adil dalam menerapkan dan mendistribusikan tiga puluh persen yang ditetapkan untuk anggaran pendidikan nasional secara keseluruhan.

Selain itu Kabupaten Mandailing Natal juga mengadukan sulitnya pembuatan paspor untuk haji, karena kantor Imi-

grasi yang berjarak sangat jauh hingga membutuhkan waktu berjam-jam. Oleh karena itu masyarakat daerah tersebut berharap DPR RI, khususnya Komisi VIII dapat mendorong pemerintah untuk mendirikan kantor Imigrasi di daerah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII, Maman Imanul Haq mengatakan, Komisi VIII DPR juga telah berulang kali meminta Pemerintah tidak menganaktirikan sekolah agama di bawah Kementerian Agama, bahkan hal itu juga pernah disampaikan Ketua Komisi VIII di sidang Paripurna. Namun kami akan kembali pertanyakan keterlambatan itu, karena anggaran tiga puluh persen dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan itu tidak semata pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan nasional serta Pendidikan tinggi, namun juga Kementerian Agama yang ikut menaungi sekolah-sekolah agama di seluruh Indonesia.

Sementara itu anggota Komisi VIII lainnya, M Fauzan mengatakan bahwa pihaknya pernah mengusulkan untuk memberikan honor guru dan karyawan MDTA sebesar 1 juta rupiah per bulannya. Bahkan ia pernah menggunakan anggaran BOS (biaya operasional sekolah) untuk membayar honor guru. Karena peruntukannya jelas, maka hal tersebut tidak menjadi masalah di kemudian harinya.

“Itu ada Permendagri nya, dan akan menjadi Perpres, boleh digunakan untuk membayar honor guru, selagi peruntukannya jelas untuk sekolah jangan takut menggunakannya,” ujar Fauzan. (Ayu), foto : ayu/parle/hr.

MASIH ADA POTENSI MAKSIMALKAN APBN

Perekonomian global diperkirakan masih akan tetap melambat. Tak dipungkiri, kondisi ini turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Namun, diharapkan Indonesia tetap bertahan pada tantangan perekonomian mendatang. Apalagi, RAPBN tahun 2016 adalah APBN pertama yang disusun oleh Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Demikian diungkapkan Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, usai memberikan materi pada diskusi yang diselenggarakan Bagian Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Sekretariat Jenderal DPR RI. Acara yang fokus menyoroti APBN ini diselenggarakan di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Selasa (18/08/15).

“Di 2016, kita masih berasumsi perekonomian dalam kondisi normal, padahal krisis selalu ada di sekitar kita. Kalau saya melihatnya, tantangan itu mesti kita respon. Sehingga resiko krisis itu tetap dapat kita kelola,” kata Hidayat.

Hidayat menambahkan, masih ada potensi yang dikembangkan untuk memaksimalkan APBN. Misalnya, walaupun ekspor komoditas tambang sedang lesu, bisa diganti dengan ekspor komoditas pangan.

“Mungkin memang kita saat ini belum memberikan perhatian yang besar terhadap komoditas ekspor pangan kita. Padahal kita memiliki potensi itu. Kita lebih banyak untuk domestik, bahkan kita malah mendapatkan komoditas



Para pembicara dalam diskusi RAPBN 2016

pangan dari luar. Hal ini tetap bisa dilakukan, walaupun kondisi perekonomian global tidak kunjung membaik,” imbu Hidayat.

Terkait besaran defisit dalam APBN, Hidayat menilai nilai defisit masih relatif aman, karena masih berada di bawah 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah masih memiliki keterbatasan anggaran, sehingga Pemerintah selalu mempertimbangkan belanja defisit.

Diskusi ini dibuka oleh Plt Kepala Bagian Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Mardi Harjo, dan diikuti oleh para Analis dan Peneliti di lingkungan Setjen DPR RI, dan Tenaga Ahli Komisi DPR maupun Anggota Dewan. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.



RAPBN 2016 SESUAI HARAPAN PASAR



Pimpinan DPR dan Ketua Komisi XI bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Sepuluh Fraksi DPR memberikan pandangan umumnya atas RUU APBN 2016 beserta Nota Keuangannya yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/08/15) pekan lalu. Dalam pandangan umumnya, sebagian besar fraksi menyetujui RAPBN pertama Pemerintahan Joko Widodo.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan (F-PAN), usai memimpin Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kamis (20/08/15). Walaupun disetujui, namun sejumlah catatan turut menyertai.

“Secara umum, seluruh fraksi menyetujui usulan RAPBN 2016, walaupun disertai dengan beberapa catatan. Antara lain kondisi perekonomian global yang kurang bersahabat. Tapi, RAPBN ini sudah realistis dengan kondisi mekanisme pasar, dan sesuai dengan harapan pasar,” kata Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Rachel Maryam Sayidina mengungkapkan, masih belum adanya perubahan fundamental terhadap RAPBN 2016 dibandingkan APBN-Perubahan 2015. F-Gerindra menilai, sulit untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam konteks pluralisme, selama 60 persen dari postur APBN yang sebesar Rp 2.121,3 triliun digunakan untuk anggaran rutin.

“Target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen memberikan cerminan minimnya upaya Pemerintah untuk sungguh-

sungguh bekerja dalam menggerakkan ekonomi,” tegas Rachel.

Sementara itu, Fraksi PAN yang pandangan fraksinya dibacakan Laila Istiana menganggap, target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang sebesar 5,5 persen, dinilai masih sangat ambisius. Mengingat capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II hanya 4,6 persen, dan 4,6 persen.

“Fraksi PAN meminta Pemerintah agar merevisi target pertumbuhan ekonomi ke angka yang lebih realistis, sebagaimana proyeksi F-PAN di angka 5,2 persen,” papar Laila.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, mengatakan inflasi pada RAPBN 2016 yang diperkirakan sebesar 4,7 persen diharapkan mampu dicapai dalam rangka menjaga tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat. Dengan angka inflasi sebesar itu, F-PG berharap agar suku bunga SBN yang dipatok sebesar 5,5 persen dapat ditekan lebih rendah lagi.

“Terkait nilai tukar rupiah yang ditetapkan sebesar Rp 13.400 per dolar AS, F-PG berharap Pemerintah terus meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah yang sedang mencari titik keseimbangan baru,” jelas Ridwan.

Juru bicara F-PDI Perjuangan, Sirmadji Tjondro Pragolo, mengatakan, ada indikasi kuat terjadi “perang mata uang” (currency war) antara Tiongkok dan Amerika. “F-PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah agar

menunjukkan sikap serius dengan melakukan langkah koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar rupiah,” jelas Sirmadji.

Terkait target inflasi, F-Partai Demokrat menilai target inflasi sebesar 4,7 persen masih cukup realistis. F-PD berharap Pemerintah dan BI bekerja lebih keras lagi dalam menjaga dan menekan laju inflasi tersebut. “F-PD juga meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tetap bekerja keras supaya inflasi bisa ditekan dan bisa dikendalikan dengan baik,” kata juru bicara F-PD, Verna Gladies Merry Inkiriwang.

Sementara itu, juru bicara F-PKS, Abdul Fikri menilai, asumsi inflasi yang ditetapkan sebesar 4,7 persen, masih dapat ditekan di bawah 4 persen dan dalam jangka panjang, harus dijaga tetap rendah untuk menjaga daya beli masyarakat secara luas.

F-PPP menilai, sesungguhnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadi minimal 5,5 persen juga bukan sesuatu yang mustahil jika Pemerintah serius dalam mengupayakan peningkatan investasi atau pembentukan modal tetap bruto Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Juru bicara F-PKB, Syaikhul Islam Ali menayangkan target *lifting* minyak dan gas bumi yang tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan Pemerintah tidak cukup optimis dalam menetapkan besaran *lifting*, padahal potensi kedua sumber daya alam ini masih cukup besar.

Dadang Rusdiana, juru bicara F-Hanura memandang, angka inflasi yang ditetapkan sebesar 4,7 persen kurang realistis bila melihat perkembangan inflasi sampai dengan Mei 2015 yang mencapai 6,8 persen. Sementara juru bicara fraksi F-Nasdem, Donny Imam Priambodo mengatakan, besaran inflasi sebesar 4,7 persen cukup ideal.

(sf) foto: andri/parle/iw



Pimpinan DPR menerima piagam Rekor MURI untuk lomba Panjat Bambu sebanyak 70 batang, Minggu (16/08). Foto : Eka Hindra/Parle/HR



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah menghadiri Perlombaan mewarnai dan panjat bambu dalam Pesta Rakyat HUT RI ke 70, Minggu (16/08)
Foto : Eka Hindra, Iwan Armanias/Parle/HR



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi inspektur upacara HUT RI 70 di halaman Gedung DPR/MPR/DPD RI, Minggu (16/08)Foto : Andi/Parle/HR